

## Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Metode Value for Money Pada Pemerintahan Kabupaten Bogor Tahun 2022

**Shanty Nurrochma Kusuma Putri**  
Universitas Bina Sarana Informatika

**Sonny Fransisco Siboro**  
Universitas Bina Sarana Informatika

**Afifah Bilqis**  
Universitas Bina Sarana Informatika

**Siti Vidia Regita Cahyani**  
Universitas Bina Sarana Informatika

**Abstract.** *The Bogor Regency Government needs to analyze financial performance using the Value For Money method to ensure that each financial unit spent provides optimal value for the community. The method used is descriptive quantitative. The population in this study is the Bogor Regency Government Budget Realization Report in 2022. Calculation of financial performance using the economic level shows that in 2022, the financial performance of the local government has increased with a ratio of 93.51%, this shows that in managing the government budget as much as possible to achieve the planned program. The calculation of performance at the efficiency level reaches 86.23%, this shows that the government can use the least resources to achieve the most goals. At the effectiveness level, it is considered ineffective with a calculation ratio of 98.41%.*

**Keywords:** *Financial Performance Analysis Using the Value For Money Method in Bogor Regency Government in 2022*

**Abstrak.** Pemerintah Kabupaten Bogor perlu melakukan analisis kinerja keuangan dengan metode *Value For Money* untuk memastikan setiap unit keuangan yang dikeluarkan memberikan nilai yang optimal bagi masyarakat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2022. Perhitungan kinerja keuangan menggunakan tingkat ekonomis menunjukkan bahwa pada tahun 2022, kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat dengan rasio sebesar 93,51% hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan anggaran pemerintah, sudah seminimal mungkin untuk mencapai program yang direncanakan. Perhitungan kinerja pada tingkat efisiensi mencapai 86,23% hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dapat menggunkan sumber daya yang paling sedikit untuk mencapai tujuan yang paling banyak. Pada tingkat efektivitas dianggap tidak efektif dengan rasio perhitungan sebesar 98,41%

**Kata kunci:** Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Metode Value For Money Pada Pemerintahan Kabupaten Bogor Tahun 2022

### PENDAHULUAN

*Value For Money (VFM)* adalah suatu konsep yang digunakan dalam pengukuran seberapa jauh suatu entitas telah mencapai nilai yang optimal dari setiap unit yang dikeluarkan. Dalam konteks pemerintah, VFM menjadi penting karena mengingatkan pentingnya pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif demi memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Metode VFM tidak hanya

mempertimbangkan aspek keuangan semata, tetapi juga efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

Pemerintah Kabupaten Bogor perlu melakukan analisis kinerja keuangan dengan metode VFM untuk memastikan bahwa setiap unit keuangan yang dikeluarkan memberikan nilai yang optimal bagi masyarakat. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, serta tuntutan akan layanan publik yang semakin kompleks, peningkatan kinerja keuangan menjadi krusial. Analisis kinerja keuangan dengan metode VFM dapat membantu pemerintah kabupaten Bogor dalam mengevaluasi sejauh mana keuangan publik telah dikelola dengan baik dan memberikan nilai yang optimal bagi masyarakat.

Salah satu aspek yang perlu dievaluasi dalam analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten Bogor dengan metode VFM adalah efisiensi pengeluaran. Dengan menggunakan metrik efisiensi pengeluaran, pemerintah kabupaten Bogor dapat mengevaluasi sejauh mana setiap unit keuangan yang dikeluarkan telah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi potensi pemborosan serta peningkatan efisiensi, pemerintah kabupaten Bogor dapat meningkatkan kinerja keuangannya.

Selain itu, analisis kinerja keuangan dengan metode VFM juga memperhatikan efektivitas program-program yang dijalankan oleh pemerintah kabupaten Bogor. Dalam mengukur efektivitas program-program tersebut, pemerintah dapat mengevaluasi sejauh mana program-program tersebut memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan menganalisis dan mengevaluasi efektivitas program-program tersebut, pemerintah kabupaten Bogor dapat mengidentifikasi program-program yang perlu ditingkatkan atau bahkan dihentikan untuk meningkatkan kinerja keuangan.

Transparansi pengelolaan keuangan juga menjadi aspek penting dalam analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten Bogor dengan metode VFM. Dengan memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel, pemerintah kabupaten Bogor dapat memastikan bahwa setiap keputusan keuangan yang diambil telah mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Transparansi dalam pengelolaan keuangan juga menjadi indikator bahwa pemerintah kabupaten Bogor bertanggung jawab dan profesional dalam mengelola keuangan publik.

Dalam konteks pemerintah kabupaten Bogor, analisis kinerja keuangan dengan metode VFM merupakan langkah penting dalam meningkatkan kinerja keuangan publik. Dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pengelolaan keuangan, pemerintah kabupaten Bogor dapat memastikan bahwa setiap unit keuangan yang dikeluarkan memberikan nilai yang optimal bagi masyarakat. Evaluasi kinerja keuangan ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah kabupaten Bogor dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya guna. Dengan demikian, analisis kinerja keuangan dengan metode VFM pada pemerintah kabupaten Bogor pada tahun 2022 merupakan langkah penting dalam meningkatkan kinerja keuangan publik. Melalui evaluasi yang komprehensif dan pengambilan langkah-langkah perbaikan yang tepat, pemerintah kabupaten Bogor dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik berjalan efisien dan efektif serta memberikan nilai yang optimal bagi masyarakat. Peran pemerintah kabupaten Bogor sebagai pengelola keuangan publik yang profesional dan bertanggung jawab akan semakin dipercaya melalui analisis kinerja keuangan dengan metode VFM.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengukuran Kinerja**

#### **Pengertian Pengukuran Kinerja**

Menurut Mardiasmo (2009,hal;121) Pengukuran kinerja adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui ala tukur financial dan non financial.

Sementara itu Arfan Ikhsan, Muhamad Yamin, Heny Tri Astuti dan Hamdani (2015,hal;271) pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan ke arah pencapaian tujuan melalui hasil-hasil yang di tampilkan baik berupa produk, jasa maupun suatu proses.

Sedangkan menurut Nordiawan dan Hertianti (2010,hal;158) Pengukuran kinerja adalah instrumen yang di gunakan untuk menilai hasil ahir pelaksanaan kegiatan terhadap target dan tujuan kegiatan yang di tetapkan sebelumnya.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu proses atau sistem yang mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan yang telah di tetapkan sebelumnya.

### **Tujuan Pengukuran Kinerja**

Menurut Mahmudi (2007;14) mengidentifikasi tujuan di lakukan pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik, yaitu:

1. Mengetahui tingkat pencapaian tujuan organisasi
2. Menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai
3. Memperbaiki kinerja untuk untuk priode berikutnya

### **Manfaat Pengukuran Kinerja**

Menurut Mardiasmo (2009;122) manfaat pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik, yaitu :

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara obyektif atas pencapaian prestasi yang di ukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah di sepakati.

### **Indikator Pengukuran Kinerja**

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemda. Menurut Mohamad Mahsun (2012;196) indikator Kinerja Keuangan Daerah meliputi :

- 1) Jumlah dana yang dibutuhkan
- 2) Jumlah pegawai yang dibutuhkan
- 3) Jumlah infra struktur yang ada
- 4) Jumlah waktu yang digunakan

### **Kendala dan Tantangan Pengukuran Kinerja**

Menurut Arfan Ikhsan, Muhamad Yamin, Heny Tri Astuti dan Hamdani (2015;271) ada beberapa kendala pengukuran kinerja organisasi sektor publik antara lain :

- a) Pengukuran kinerja sektor publik tidak bisa dinilai hanya berdasar rasio-rasio keuangan, karena tujuan organisasi bukan memaksimalkan laba.
- b) Output berupa pelayanan biasanya bersifat kualitatif,

*intangible* dan *indirect* sehingga sulit di ukur.

c) Antara input dan output tidak mempunyai hubungan secara langsung (*disrectionary cost center*) karena sulitnya menetapkan standar sebagai tolak ukur produktivitas.

d) Tidak beroperasi berdasarkan *market forces* sehingga tidak ada pembanding yang independen dan memerlukan instrumen pengganti mekanisme pasar dalam mengukur kinerja.

e) Mengukur kepuasan masyarakat yang heterogen dari jasa pelayanan organisasi sektor publik tidak mudah dilakukan.

### ***Value For Money***

#### **Pengertian *Value For Money***

Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat di nilai dari output yang di hasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input,output dan outcome secara bersama-sama. Bahkan untuk beberapa hal perlu di tambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (*equity and service coverage*)

Menurut Mardiasmo (2009, hal;133) “*Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama yaitu ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaanya di minimalkan dan hasilnya di maksimalkan, dan efektivitas (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok *value for money*”.

*Value For Money* merupakan konsep penting di dalam organisasi sektor publik di mana value for money memiliki pengertian terhadap nilai uang. *Value for money* yang merupakan pengukuran kinerja yang di gunakan perusahaan publik (Mahmudi,2011;89)

Menurut Indra Bastian (2006: 335) “*Value For Money* merupakan konsep yang meliputi penilaian Ekonomis,Efektivitas, dan Efisiensi dalam Pengukuran Kinerjanya . Tujuan *Value for money* adalah untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan memperbaiki kinerja pemerintah (Mardiasmo,2009:7).

*Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada unit- unit kerja pemerintah dan merupakan indikator yang memberikan

informasi kepada kita apakah anggaran (dana) yang di belanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Deskriptif Kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2017) dalam (Sampow & Pangkey, 2022), Penelitian Deskriptif adalah statistik untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data bagaimana membuat kesimpulan umum atau generalisasi.

Populasi adalah dimana seluruh objek penelitian terdapat sumber data untuk penelitian tertentu Menurut (Sugiyono, 2013) dalam (Sampow & Pangkey, 2022). Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2022.

Teknik analisis data pada penelitian ini yang digunakan adalah mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan cara menggunakan Ekonomi, Efisiensi dan Efektivitas.

1. Mengumpulkan data penelitian pada Data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2022.
2. Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor dengan cara menggunakan Ekonomi, Efisiensi dan Efektivitas.

- Nilai Rasio Ekonomis

Menurut (Mardiasmo, 2016), Ekonomis mengacu pada sejauh mana organisasi sektor publik dapat mengurangi input sumber daya dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\%$$

Input : Realisasi Belanja

Input Value : Anggaran Belanja

Ekonomis adalah sebagai berikut :

- a. Jika diperoleh < 100% berarti ekonomis
- b. Jika diperoleh >100% berarti tidak ekonomis
- c. Jika diperoleh = 100% berarti ekonomis berimbang

- Nilai Rasio Efisiensi

Menurut (Bastian, 2017), Efisiensi adalah hubungan antara input dan output di mana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai output tertentu.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Output : Realisasi Belanja

Input : Realisasi Pendapatan

Efisiensi adalah sebagai berikut :

- a. Jika diperoleh < 100% berarti efisien
- b. Jika diperoleh > 100% berarti tidak efisien
- c. Jika diperoleh = 100% berarti efisien berimbang

- Nilai Rasio Efektivitas

Menurut (Bastian, 2017), Efektivitas adalah hubungan yang diperoleh diantara output atau tujuan. Tingkat output, kebijakan, dan praktik organisasi mencapai tujuan diukur sebagai ukuran efektifitas.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{output}} \times 100\%$$

Outcome : Realisasi Pendapatan

Output : Anggaran Pendapatan

Efektifitas adalah sebagai berikut :

- a. Jika diperoleh < 100% berarti tidak efektif
  - b. Jika diperoleh > 100% berarti efektif
  - c. Jika diperoleh = 100% berarti efektifitas berimbang
3. Membuat kesimpulan yang dilakukan pada penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian Pada Laporan Pemerintah Kabupaten Bogor



**PEREMINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMDA**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**  
**PERIODE : 01 JANUARI 2022 S/D 31 DESEMBER 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
<b>41</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>3.739.093.754.030,00</b>	<b>3.736.339.670.768,06</b>	<b>99,93</b>	<b>3.761.911.243.274,10</b>
411	Pendapatan Pajak Daerah	2.369.772.820.000,00	2.595.242.368.968,00	109,51	2.455.952.013.987,00
412	Pendapatan Retribusi Daerah	153.751.721.189,00	63.880.960.876,00	61,07	126.416.502.513,00
413	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	74.195.370.019,00	75.890.020.313,00	102,24	71.300.513.620,00
414	Lain-lain PAD yang lain	1.141.374.542.822,00	891.337.281.658,06	81,10	1.160.200.212.874,10
<b>42</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>5.430.955.078.631,00</b>	<b>5.282.059.672.994,00</b>	<b>97,27</b>	<b>4.729.476.665.526,00</b>
<b>421</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>3.745.851.537.015,00</b>	<b>3.601.509.058.298,00</b>	<b>96,15</b>	<b>3.065.553.447.040,00</b>
42101	Dana Bagi Hasil Pajak	242.049.744.287,00	243.228.459.831,00	100,49	248.533.128.799,00
42102	Bagi Hasil Bukan Pajak	122.382.842.821,00	123.868.033.342,00	101,07	287.232.105.642,00
42103	Dana Alokasi Umum	1.859.685.602.453,00	1.841.417.562.860,00	99,02	1.863.196.087.000,00
42104	Dana Alokasi Khusus	1.621.733.047.854,00	1.393.184.902.295,00	91,55	889.589.125.699,00
422	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	568.914.807.000,00	568.802.884.307,00	99,98	596.314.285.200,00
42202	Dana Penyesuaian	568.914.807.000,00	568.802.884.307,00	99,94	596.314.285.200,00
<b>423</b>	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>1.116.188.734.616,00</b>	<b>1.113.047.730.391,00</b>	<b>99,72</b>	<b>1.065.608.933.280,00</b>
42301	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	959.078.437.300,00	957.839.447.551,00	99,87	772.550.878.548,00
42302	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	157.110.297.316,00	155.211.282.840,00	98,79	293.050.054.734,00
<b>43</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>5.823.485.099,00</b>	<b>10.707.892.912,00</b>	<b>185,41</b>	<b>453.259.999.074,00</b>
433	Pendapatan Hibah	5.823.485.099,00	10.707.892.912,00	185,41	38.127.276.074,00
434	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	597.107.923.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>9.175.672.297.760,00</b>	<b>9.029.607.236.616,06</b>	<b>98,41</b>	<b>9.124.627.007.868,10</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>51</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>6.690.549.954.501,00</b>	<b>6.341.846.179.088,00</b>	<b>94,79</b>	<b>5.521.703.558.330,00</b>
511	Belanja Pegawai	2.617.045.932.846,00	2.541.872.794.642,00	97,13	2.710.797.880.994,00
512	Belanja Barang	3.400.769.209.210,00	3.160.689.590.713,00	92,92	2.458.289.947.048,00
513	Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
516	Hibah	635.412.002.745,00	588.573.763.733,00	92,31	321.511.235.288,00
516	Bantuan Sosial	37.323.410.000,00	22.704.000.000,00	60,83	31.138.000.000,00
SIMR@L	SAP / PP-71				Hu 1

Sumber : PPID Bogor

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
<b>52</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.877.429.434.379,00</b>	<b>1.414.632.066.780,00</b>	<b>75,48</b>	<b>1.791.254.453.271,00</b>
521	Belanja Tanah	27.063.394.780,00	22.862.910.800,00	84,59	8.252.278.208,00
522	Belanja Peralatan dan Mesin	444.142.626.935,00	416.040.409.365,00	93,67	469.101.585.532,00
523	Belanja Gedung dan Bangunan	440.593.609.387,00	388.685.025.831,00	87,78	620.630.488.097,00
524	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	632.910.563.342,00	598.761.710.894,00	94,57	548.652.156.555,00
525	Belanja Asas, Teras, Lainnya	32.718.960.130,00	32.302.080.800,00	98,73	59.547.244.870,00
<b>53</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>59.532.570.574,00</b>	<b>30.229.239.141,00</b>	<b>50,78</b>	<b>75.948.512.154,00</b>
531	Belanja Tak Terduga	59.532.570.574,00	30.229.239.141,00	50,78	75.948.512.154,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>8.327.511.969.354,00</b>	<b>7.786.727.484.029,00</b>	<b>93,51</b>	<b>7.298.906.523.755,00</b>
<b>6</b>	<b>TRANSFER</b>				
<b>61</b>	<b>TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA</b>	<b>222.435.091.990,00</b>	<b>222.278.611.315,00</b>	<b>99,93</b>	<b>166.154.858.910,00</b>
611	Transfer Bagi Hasil Pajak	216.569.110.615,00	216.421.150.920,00	99,93	159.830.418.591,00
612	Transfer Bagi Hasil Retribusi	5.865.981.375,00	5.857.501.395,00	99,89	6.324.440.210,00
<b>62</b>	<b>TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>1.309.890.796.342,00</b>	<b>1.301.396.862.020,00</b>	<b>99,38</b>	<b>1.243.322.750.866,00</b>
621	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	544.058.005.000,00	543.948.172.307,00	99,83	523.047.682.200,00
622	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	765.832.791.342,00	757.450.489.713,00	99,01	720.284.768.666,00
	<b>JUMLAH TRANSFER</b>	<b>1.532.325.888.332,00</b>	<b>1.523.675.273.337,00</b>	<b>99,44</b>	<b>1.409.487.609.776,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>9.859.837.847.686,00</b>	<b>9.310.402.757.366,00</b>	<b>94,43</b>	<b>8.708.394.133.531,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(684.165.549.926,00)</b>	<b>(280.795.520.749,94)</b>	<b>41,04</b>	<b>416.228.874.337,10</b>
<b>7</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>71</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>803.205.909.926,00</b>	<b>803.205.909.926,07</b>	<b>100,00</b>	<b>386.977.035.589,00</b>
711	Penggunaan SLPA	803.205.909.926,00	803.205.909.926,07	100,00	386.977.035.589,00
<b>72</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>119.040.349.000,00</b>	<b>119.040.344.829,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
721	Pembentukan Dana Cadangan	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	0,00
722	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	69.040.349.000,00	69.040.344.829,00	100,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>684.165.549.926,00</b>	<b>684.165.545.101,07</b>	<b>100,00</b>	<b>386.977.035.589,00</b>
SIMR@L	SAP / PP-71				Hu 2

Sumber : PPID Bogor

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	403.370.044.351,13	0,00	803.205.909.926,10

Sumber : PPID Bogor

### 1. Perhitungan Ekonomis

Perhitungan ekonomis pada data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2022 sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2022} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

$$= \frac{7.786.727.484.029,00}{8.327.511.959.354,00} \times 100\%$$

$$= 93,51\%$$

### 2. Perhitungan Efisiensi

Perhitungan efisiensi pada data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2022 sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2022} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

$$= \frac{7.787.727.484.029,00}{9.029.607.236.616,06} \times 100\%$$

$$= 86,23\%$$

### 3. Perhitungan Efektivitas

Perhitungan efektivitas pada data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2022 sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2022} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

$$= \frac{9.029.607.236.616,06}{9.175.672.297.760,00} \times 100\%$$

$$= 98,41\%$$

## **PEMBAHASAN**

### **Ekonomis**

Perhitungan kinerja keuangan menggunakan rasio ekonomis menunjukkan bahwa pada tahun 2022, kinerja keuangan pemerintah daerah akan meningkat dengan rasio sebesar 93,51% dengan kriteria ekonomis. Ini menunjukkan bahwa penganggaran Kabupaten Bogor berarti ekonomis karena pada tahun 2022 diperoleh kurang dari 100%. Maka program yang diselesaikan sesuai dengan kriteria ekonomis pada tahun 2022, yang menunjukkan kinerja yang baik.

### **Efisiensi**

Perhitungan kinerja keuangan menggunakan rasio efisiensi menunjukkan bahwa realisasi penganggaran Kabupaten Bogor dengan tingkat efisiensi dianggap efisien. Dengan kriteria efisiensi pada tahun 2022 adalah mencapai sebesar 86,23%. Maka keberhasilan pemerintah dalam mencapai anggaran belanja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

### **Efektivitas**

Perhitungan kinerja keuangan menggunakan rasio efektivitas menunjukkan bahwa realisasi anggaran Kabupaten Bogor pada tahun 2022 dianggap tidak efektif dengan rasio sebesar 98,41%. Ini menunjukkan karena kegiatan atau program yang telah dilaksanakan pemerintah berjalan dengan baik. Maka realisasi program berada pada kriteria tidak efektif selama tahun 2022.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian ini pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2022, dengan menggunakan metode value for money, hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Pada Rasio Ekonomis anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bogor tahun 2022 terdapat hasil yang kurang dari 100%, maka dikategorikan sebagai ekonomis, dengan rata-rata perhitungan tingkat ekonomi sebesar 93,51%. Ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan pelaksanaan anggaran pemerintah sudah dilakukan dengan baik untuk mencapai program atau kegiatan yang direncanakan.
2. Pada Rasio Efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2022 terdapat hasil yang kurang dari 100%, tingkat efisiensinya dikategorikan sebagai efisiensi, dengan rata-rata perhitungan tingkat efisiensi sebesar 86,23%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah dalam menggunakan sumber daya yang sedikit untuk mencapai target tujuan yang paling banyak.
3. Pada Rasio Efektivitas anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2022 terdapat hasil yang tidak efektif, dengan rata-rata perhitungannya sebesar 98,41%. Ini menunjukkan bahwa kegiatan atau program telah dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan harapan.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diuraikan sebelumnya, diharapkan evaluasi kembali program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Bogor untuk mencapai tujuan dan mencapai kinerja program atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rasio ekonomis Kabupaten Bogor dapat disarankan dengan meningkatkan lagi pada penghematan anggaran untuk menghindari terjadinya pengeluaran mengurangi biaya yang tidak diperlukan dalam mencapai program yang ingin dicapai. Dalam rasio efisiensi Kabupaten Bogor disarankan untuk menempatkan lebih banyak perhatian pada proses perencanaan realisasi anggaran belanja, dan dalam rasio efektivitas Kabupaten Bogor disarankan untuk memperhatikan serta meningkatkan kinerja mereka untuk mendukung pengelolaan pemerintah yang baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agatha V. (2023, Juli 25) “Kronologi Kasus Korupsi Tambang Nikel hingga Pejabat ESDM Ditahan dan Negara Rugi Rp.5,7” <https://www.suara.com/news/2023/07/25/154523/kronologi-kasus-korupsi-tambang-nikel-hingga-pejabat-esdm-ditahan-dan-negara-rugi-rp57-t>
- Alexandre, J. F. X., Taufik, M., & Hidayat, H. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money Pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015-2021. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 1(4), 201-218.
- Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). Analisis kinerja keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 83-93.
- Da Cunha, A. A., Herdi, H., & Aurelia, P. N. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 86-100.
- EtikaProfesi. (2023). Penerbit NEM. <https://books.google.co.id/books?id=HuTgEAAAQBAJ>
- Karen, K., Yenanda, K., & Evelyn, V. (2022). Analisa Pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik Pada Pt Garuda Indonesia Tbk. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 189–198. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.519>
- Kristianto, J., & MM, M. H. A. (2022). PENGERTIAN KORUPSI. *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas*, 161.
- Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2022. (2022)
- Pratiwi, R. (2023). Analisis Pelanggaran Prinsip Dasar Etika Akuntan Pada PT. Asuransi Jiwasraya. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 20(1), 212–221
- Putri, D. (2021). Korupsi Dan Prilaku Koruptif. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 5(2).
- Sanger, G. W., Manossoh, H., & Korompis, C. W. (2023). Evaluasi Kinerja Keuangan Dengan Metode Value For Money Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(2), 1193-1202.